

PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

Jl. Haryono MT No.46 Banjarmasin

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANSHORI THOYIB, SH. MH.

Jabatan : Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. MACHMUD RACHIMI, SH. MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

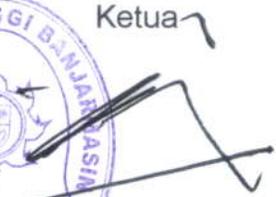
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, Februari 2016

Panitera

Ketua 

H. MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 19501110 197104 1 001


ANSHORI THOYIB, SH. MH.
NIP. 19560705 197903 1 009

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. IRWAN

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. MACHMUD RACHIMI, SH. MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, Februari 2016

Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Ketua 7

H. MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 19501110 197104 1 001


Drs. IRWAN
NIP. 19650419 198503 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu (tidak lebih dari 3 bulan)	90%
		b. Persentase penurunan tunggakan perkara	70%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	70%
2.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	a. Persentase pembaharuan data di dalam website untuk mempermudah akses informasi terhadap peradilan	60%
3.	Terwujudnya manajemen sistem informasi yang menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan, dan akuntabel	a. Integrasi informasi perkara secara elektronik	80%
		b. Integrasi informasi penyerapan DIPA secara elektronik	80%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	80%
4.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
5.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM	a. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	50%
		b. Persentase pembaharuan data pegawai di aplikasi SIKEP dan KOMDANAS	80%
6.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel,	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan	80%

	efektif dan efisien	
	b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	80%

- A. Jumlah Anggaran DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
 Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Rp 37.606.296.000,- (*tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- B. Jumlah Anggaran DIPA 03 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM)
 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp 38.463.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).

Banjarmasin, Februari 2016

 Ketua

Dr. H. MACHMUD RACHIMI, SH. MH.
 NIP. 19501110 197104 1 001

Panitera

ANSHORI THOYIB, SH. MH.
 NIP. 19560705 197903 1 009

Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Drs. IRWAN
 NIP. 19650419 198503 1 005